

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan kekuatan ekonomi besar di dunia yang mengalami perkembangan pesat di bidang ekonomi. Di balik kesuksesannya, terdapat salah satu permasalahan sosial yaitu diskriminasi gender yang masih menjadi ancaman bagi perempuan Korea Selatan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan berkat adanya ajaran Konfusianisme yang tertanam sangat dalam di masyarakat Korea Selatan. Terpilihnya Moon Jae-in setelah dimakzulkannya Park Geun-hye pada 2017 atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan menjadi angin segar bagi perempuan Korea Selatan terkait hak-hak mereka serta mengenai kesetaraan gender. Sebagai negara yang meratifikasi CEDAW, sudah menjadi kewajiban Korea Selatan untuk mengadopsi nilai-nilai CEDAW ke dalam kebijakan dalam negerinya mengenai hak-hak perempuan. CSW mewajibkan semua negara yang meratifikasi untuk melakukan *state duties* yang terdiri dari *Promote*, *Protect*, dan *Prevent* sebagai upaya mempromosikan hak-hak perempuan dan menghapus diskriminasi gender. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setiap upaya Korea Selatan mengenai diskriminasi gender yang tertuang dari beberapa kebijakan dan strategi menjadi perwujudan dari *state duties* di sektor ekonomi, politik, dan sosial budaya yang diwajibkan oleh CSW.

Pertama, *Promote* yang terlaksana melalui beberapa kebijakan dan strategi nasional Korea Selatan dalam mempromosikan kesetaraan gender baik di dalam maupun luar negeri. Selain mengadakan pendidikan kesetaraan gender dan memberi insentif kepada perusahaan yang mampu meningkatkan jumlah manajer mereka, *state duties Promote* terlaksana lebih jauh. Beberapa kebijakan/program dari *Promote* adalah adanya *five-year economic policy* yang bertujuan memperkuat ekonomi sebagai upaya mempromosikan kesetaraan gender. Upaya ini dilakukan melalui adanya kewajiban mengambil cuti melahirkan, cuti menstruasi, mendirikan pusat konseling *re-employment* bagi ibu yang mengalami *career-interrupted* untuk kembali ke pasar tenaga kerja. Selain itu, penunjukan menteri-menteri perempuan di kabinet Moon Jae-in menjadi upaya Moon pertama kali dalam mempromosikan kesetaraan gender di bidang politik.

Kedua, *Protect* yang terpenuhi melalui beberapa kebijakan/program dengan tujuan untuk memastikan adanya perlindungan dari negara melalui struktur hukum yang jelas.

Kebijakan yang termasuk pada ranah ini yaitu ketika Pemerintah Korea Selatan berkomitmen untuk memperkuat payung hukum terkait kejahatan seksual *online* melalui kebijakan *zero-tolerance* serta adanya pemblokiran aplikasi *random-chat*. Dalam memperbaiki hidup dari *single-parent*, Korea Selatan melalui MOGEF menerapkan kebijakan bantuan subsidi dana dalam bentuk *childcare support*. Selain itu, *the Basic Plan 2006-2025* dibentuk dengan tujuan untuk memberikan solusi kepada keluarga dan perempuan di Korea Selatan sebagai upaya mengatasi permasalahan rendahnya tingkat kesuburan. Upaya Pemerintah Korea Selatan melalui dibentuknya *The Basic Plan 2006-2025* ini merupakan perwujudan nilai dari *Protect*.

Ketiga, *Prevent* terpenuhi melalui beberapa kebijakan yang berfokus pada adanya upaya pencegahan dari Pemerintah Korea Selatan agar diskriminasi gender tidak terjadi lagi. Beberapa kebijakan yang memenuhi nilai *Prevent* yaitu seperti adanya AA bagi korban kejahatan seksual *online* melalui dibentuknya DSCVSC; adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan yang memutuskan untuk mencabut larangan aborsi pada 11 April 2019 serta adanya keputusan Pemerintah Korea Selatan untuk menghapus kriminalisasi praktik aborsi pada 1 Januari 2021.

Upaya-upaya di atas dilakukan dengan tujuan agar Korea Selatan bisa memberikan kesetaraan gender dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat khususnya perempuan. Sehingga bisa dikatakan bahwa Korea Selatan sukses memenuhi setiap tanggung jawabnya sebagai negara yang meratifikasi CEDAW.

## 4.2 Saran

Kesetaraan gender merupakan hak semua orang sebagai jembatan untuk mengakses hak-hak fundamental sebagai seorang manusia. Negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional harus bisa menjamin rakyatnya dalam mendapatkan hak asasi. Langkah-langkah tegas harus diambil negara jika dalam perjalanannya terdapat pelanggaran atau praktik diskriminasi gender. Penelitian mengenai diskriminasi gender ini bisa terus dilakukan karena merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat. Sehingga, Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunannya. Maka dari itu, Penulis memberikan saran penelitian ini harus dilanjutkan seiring adanya berbagai kemajuan serta perkembangan mengenai diskriminasi gender dalam berbagai bidang di Korea Selatan. Hal ini tentu saja memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana komitmen era baru Korea Selatan dalam menerapkan nilai-nilai yang ada dalam CEDAW.